

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020-2024

Area Manajemen Perubahan

No	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi;	Komitmen yang Kuat dari Agen Perubahan Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;	Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi				
			Penyusunan, Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	Monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi		
	Perubahan pola pikir dan budaya kerja; Budaya perubahan yang semakin melekat	Tertanamnya nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	Pengembangan dan Penguatan Kaidah Perilaku Utama Nilai-Nilai RB		Edukasi, Monitoring dan Evaluasi Kaidah Perilaku Utama Nilai Nilai RB		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kaidah Perilaku Utama Nilai-Nilai RB
			Penguatan integritas	Penguatan integritas	Penguatan integritas	Penguatan integritas	Penguatan integritas
				Apresiasi Unit Berintegritas			
			Sosialisasi pengendalian strategi pencegahan korupsi	Monitoring pengendalian strategi pencegahan korupsi			
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan, Penguatan serta monitoring dan evaluasi peran Agen Perubahan dan Role Model - Penyempurnaan sistem whistle blowing system - Penyempurnaan sistem pelaporan gratifikasi ASN 						

Area Deregulasi Kebijakan

	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<p>menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan</p> <p>meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan</p> <p>menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha;</p>	<p>Kebijakan terkait pelayanan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama</p> <p>Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi Pemetaan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor Perdagangan 2. Deregulasi Aturan yang menghambat birokrasi 3. Evaluasi Berkala Peraturan Perundang-undangan 4. Perencanaan Regulasi/ Kebijakan 5. Implementasi Kebijakan Sektor ESDM 6. Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM 				

Area Penataan dan Penguatan Organisasi

No	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<p>Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal;</p> <p>Meningkatnya kapasitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi;</p> <p>Terciptanya desain organisasi yang mendukung kinerja;</p>	<p>Telah dilakukannya penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.</p> <p>Terpenuhinya kondisi jumlah peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi.</p> <p>Telah dilakukannya evaluasi kelembagaan berbasis kinerja</p>	1. Evaluasi Kelembagaan	<p>Sosialisasi Permen PAN 20/2018 tentang pedoman evaluasi instansi pemerintah</p> <p>Evaluasi Kelembagaan sesuai Permen PAN 20/2018 tentang pedoman evaluasi instansi pemerintah</p> <p>Persiapan penataan kelembagaan</p>	Penataan Kelembagaan	Evaluasi kelembagaan	
				Monitoring dan evaluasi penyederhanaan Eselon 3 dan 4			

Area Penataan Tata Laksana

No	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	<p>Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan</p> <p>Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi</p> <p>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen</p> <p>Meningkatnya kinerja</p>	<p>Terimplementasinya SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien;</p> <p>Terimplementasinya transformasi digital pada bidang proses bisnis utama, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal;</p>	konsep Proses Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Proses Bisnis - Menyusun SOP sesuai dengan proses bisnis - Evaluasi SOP yang sudah disusun 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi kebijakan Probis dengan kebijakan proses bisnis OPD lain (dukung SPBE) ' <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi proses bisnis yang telah tersusun - Evaluasi proses bisnis sudah diimplementasikan 			
				- Penyusunan Proses Bisnis instansi dan unit secara komprehensif dan mencapai postur ideal sampai dengan level SOP				
				<p>Peningkatan kompetensi pengelola BMD</p> <p>Evaluasi dan penyelesaian permasalahan hasil inventarisasi BMD</p> <p>Monitoring dan evaluasi perbendaharaan</p> <p>Penguatan kompetensi penyusun laporan keuangan</p> <p>Peningkatan monitoring dan evaluasi kualitas laporan keuangan</p>				
			- Penerapan Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE					
			- Pengintegrasian Sistem TIK					
				- Penyusunan Tata Kelola Terkait Integrasi Data.	Evaluasi			
			<p>Pengelolaan Arsip Bentuk Khusus</p> <p>Pemberkasan arsip aktif</p> <p>Penyajian arsip menjadi informasi (digitalisasi arsip)</p> <p>Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan</p>					

Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

No	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Peningkatan kompetensi pegawai melalui peningkatan pendidikan akademis serta pendidikan dan pelatihan				
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur	Penetapan kinerja individu	Implementasi Penilaian Kinerja (SAPA ASN)				
	Meningkatnya disiplin SDM Aparatur	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Internalisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan monev penegakkan disiplin				
	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Penyusunan Kebutuhan Pegawai	Penyusunan Rencana redistribusi Pegawai	Implementasi Redistribusi pegawai		
	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian				
		Assessment Pegawai	Pelaksanaan Assessment Kompetensi Manajerial Pegawai Pelaksanaan Assessment Kompetensi Teknis Pegawai				
		Penyetaraan Jabatan		Transformasi Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional			
		Pemberian Reward and punishment	Memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi; Melakukan evaluasi atas pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi				

Area Penguatan Akuntabilitas

No	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata;	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien melalui perhitungan jumlah program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi;	Sosialisasi SIPD	Penerapan SIPD Pendampingan SIPD Monev SIPD				
	Meningkatnya kemampuan mengelola kinerja organisasi;	Persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan e-sakip - Updating data e-sakip 					
	Meningkatnya kemampuan dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi;	Telah dilakukannya aplikasi yang terintegrasi dalam pemanfaatannya untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.						
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.	Capaian/ monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi;						
			<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kompetensi dari penyusun laporan keuangan - Peningkatan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan 					
			Pemenuhan ketersediaan data dan informasi					

Area Penguatan Pengawasan

No	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	<p>meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan</p> <p>menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang</p> <p>Meningkatkan sistem integritas</p>	<p>Prosentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);</p>	Penguatan implementasi SPIP (Risk Register dan Terbentuknya Satuan Tugas Manajemen Risiko)				
		<p>Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);</p>	Pembangunan unit kerja zona integritas				
		<p>Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang;</p>	Penguatan pengendalian gratifikasi				
		<p>Melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat;</p>	Penguatan penanganan pengaduan dan komplain				
		<p>Pembangunan Zona Integritas</p>	Pemantauan benturan kepentingan				
		<p>Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif);</p>	Pemantauan benturan kepentingan				
		<p>Pemetaan Unit Kerja untuk membangun ZI;</p>		Pengembangan E-Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi aplikasi pengawasan	Penerapan E-Pengawasan	
		<p>APIP telah menjalankan fungsi konsultatif, dan memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja</p>	Peningkatan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan				

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	<p>meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)</p> <p>meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>1. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada;</p> <p>Kesesuaian Persyaratan Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;</p> <p>Kecepatan Waktu Penyelesaian; Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis; Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;</p> <p>Kompetensi Pelaksana/Web; Perilaku Pelaksana/Web; Kualitas Sarana dan prasarana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <p>Upaya dan/atau inovasi pada pelayanan telah dipermudah:</p> <p>Waktu lebih cepat; Alur lebih pendek/singkat; Terintegrasi dengan aplikasi.</p> <p>Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab.</p>	Evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY				
			Inventarisasi inovasi		Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik		
			Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
			Penerapan budaya kerja				
			<p>Penilaian kepuasan terhadap pelayanan</p> <p>Pembuatan tata kelola pelayanan pengaduan</p> <p>Monitoring pelayanan pengaduan</p>				

Bantul,



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
NIP. 196802161993031003